



Dinas Kesehatan Kependudukan
& Pencatatan Sipil Provinsi NTT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH T A H U N 2 0 2 3

ASN BerAKHLAK

#NTT BANGKIT
#NTT SEJAHTERA

SOLIDER

#bangga
melaysai
bangsa



DINKES NTT



DINKES NTT



@DINKES CAPILNTT



@DINKESDUKCAPILNTT

KAKA SEHAT

KATA PENGANTAR



Syalom, Salve, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Om Suastiastu, Salam Sehat. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pegawai pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT serta semua pihak terkait yang telah membimbing, memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan LKIP ini. Untuk semua jasa baik, patut kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun teknik penulisan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaannya kedepan.

Semoga Tuhan memberkati kita semua, Syalom, Salve, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Om Suastiastu, Salam Sehat dan terima kasih.

Kupang, 18 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si,Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam LKIP tersebut digambarkan tentang kinerja Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dengan target kinerja yang akan dicapai.

LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun target kinerja utama menurut Peraturan Gubernur NTT Nomor 96 Tahun 2023 tentang IKU Perangkat Daerah, telah ditetapkan indikator utama pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRANA	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI INDIKATOR	RUMUS HITUNG INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	Umur harapan hidup dapat dimaksud pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup hingga usia tertentu dan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup	rata-rata peluang ataupun waktu hidup yang tersisa pada umur tertentu	Tahun	69	67,77	98
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting	Pengukuran persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu dibagi jumlah balita sasaran dikali 100%	%	12	15,2	73,33

3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.	Pengukuran menggunakan LKE khusus yang akan dinilai oleh Tim SAKIP Provinsi NTT	Poin	A	BB (78,75)	98
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan	Penilaian yang dilakukan oleh Tim TB terhadap 8 Area Perubahan yang telah ditetapkan	%	71	0	0

				yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas					
							RAT A- RAT A	90	SANG AT BERHA SIL

Pada tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah telah berganti penilaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Utama menjadi intisari dari 64 indikator RENSTRA PERUBAHAN Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT dengan target dan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2		Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3		Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5		Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit	100,00%	100%	100%	Sangat Berhasil
6		Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit	100%	0%	0%	Belum Berhasil
7		Kasus Kematian Ibu (kasus)	0 kasus	134	0%	Belum Berhasil

8		Kasus Kematian Bayi (kasus)	0 kasus	973	0%	Belum Berhasil
9		Kasus Kematian Balita (kasus)	0 kasus	1027	0%	Belum Berhasil
10		Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	6	8,8	53,3	Cukup Berhasil
		· Gizi Buruk	1,50	0,90	100	Sangat Berhasil
		· Gizi Kurang	4,5	7,9	100	Sangat Berhasil
11		Prevalensi Stunting	12	15,2	73,3	Berhasil
12		Prevalensi Underweight	14,2	21,5	49	Belum Berhasil
13		Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	100%	100%	100	Sangat Berhasil
14		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
15		Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar	1	2517	100%	Sangat Berhasil
16		Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota	0	0%	Belum Berhasil
17		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	1,00%	63,00%	63	Cukup Berhasil
18		Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	1	230	100%	Sangat Berhasil
19		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	68,00%	50,00%	74%	Berhasil
20		Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani	60	281	100%	Sangat Berhasil
21		Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja	1198	1483	100%	Sangat Berhasil
22		Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)	100,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
23		Persentase Kasus HIV Yang diobati	56%	66%	100%	Sangat Berhasil
24		Persentase Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)	100,00%	40,90%	41%	Belum Berhasil
25		Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	100,00%	77,27%	77%	Berhasil
26		Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	22 kab/kota	15 kab/kota	68%	Cukup Berhasil

27		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
28		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
29		Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit	1	32	32	Belum Berhasil
30		Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)	1	52,17	52,17	Belum Berhasil
31		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi	1	143	100%	Sangat Berhasil
32		Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100,00%	102,64%	100%	Sangat Berhasil
33		Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
34		Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (PPT)	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
35		Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	100,00%	100,00%	100%	Sangat Berhasil
36		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar.	72,00%	44,00%	61%	Cukup Berhasil
37		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	56,00%	53,00%	95%	Sangat Berhasil
38		Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	90,00%	45,77%	51%	Belum Berhasil
39		Jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD <49/100.000 penduduk	22 kab/kota	18	82%	Berhasil
40		Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	9 kab/kota	3	33%	Belum Berhasil
41		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
42		Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22 kab/kota	19 kab/kota	86%	Sangat Berhasil
43		Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	17 kab/kota	3 kab/kota	18%	Belum Berhasil

44		Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	11 kab/kota	14 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
45		Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	22 kab/kota	20 kab/kota	91%	Sangat Berhasil
46		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
47		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
48		Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
49		Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	1	100	100	Sangat Berhasil
50		Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	1	100	100	Sangat Berhasil
51		Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	1	100	100	Sangat Berhasil
52		Inovasi yang dilaksanakan	1	100	100	Sangat Berhasil
53		Pembangunan zona integritas	1	100	100	Sangat Berhasil
54		Status laporan keuangan	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
55		Nilai SAKIP	A	BB (78,75)	92,7	Sangat Berhasil
56		Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	1	100	100	Sangat Berhasil
57		Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	95%	83,34	87,7	Sangat Berhasil
58		Persentase realisasi pendapatan terhadap target	100%	119,82	100%	Sangat Berhasil
59		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif	22 kab/kota	20 kab/kota	90,9	Sangat Berhasil
60		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas.	650 unit	1374	100	Sangat Berhasil
61		Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	100	94,55	94,55	Sangat Berhasil
62		Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	100%	29,93	29,93	Belum Berhasil

63		Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100%	80,53	80,53	berhasil
64		Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	100%	0	0%	Belum Berhasil
				RATA-RATA	80,6	BERHASIL

KETERANGAN

:

	> 85% = Sangat Berhasil	41
	70%-85% = Berhasil	5
	55%-70% = Cukup Berhasil	4
	< 55% = Belum Berhasil	14

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 ini memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum yakni pada tujuan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT dan kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT pada khususnya, dari target 69 tahun dan tercapai hanya sebesar 67,77 tahun naik 0,03 dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pembangunan di bidang kesehatan ke depannya diharapkan akan menjangkau seluruh masyarakat NTT hingga ke pelosok desa tanpa kecuali.

DAFTAR ISI

Uraian	Hal
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN	
KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT	14
a. Indikator Kinerja Utama I : Usia Harapan Hidup.....	26
b. Indikator Kinerja Utama II : Prevalensi Stunting.....	36
c. Indikator Utama III : Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).....	38
d. Indikator Utama IV : Reformasi Birokrasi.....	39
B. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah kebutuhan pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan. Selanjutnya dalam penulisan LKIP ini mengacu pada PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggung-jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT selama tahun 2023 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, seluruh kinerjanya dipertanggung jawabkan kepada *pemberi*

mandat dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Renstra yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategik Pemerintah dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, Laporan Akuntabilitas Kinerja dari aspek akuntabilitas kinerja merupakan sarana eksternal organisasi bagi penerima mandat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi mandat dan *stakeholders*. *Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja dari aspek manajemen kinerja merupakan sarana internal organisasi dalam evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

C. GAMBARAN UMUM

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT merupakan unsur staf perangkat dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Bagan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu 5 Bidang Dinas dan Sekretariat serta 3 UPTD, yaitu : (1) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan; (2) Bidang Kesehatan Masyarakat; (3) Bidang Pelayanan Kesehatan; (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan (6) Sekretariat; (7) UPT Laboratorium Kesehatan; (8) UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan; dan (9) UPT RS Jiwa Naimata.

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang SDM Kesehatan membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan

Fungsional :

- a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ;
- b. Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB;
- b. Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- c. Kelompok Kabtaan Fungsional.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keseahtan Jiwa;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil membawahi 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan;
8. UPT Laboratorium Kesehatan;
9. UPT Rumah Sakit Jiwa Naimata

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dalam pelaksana pengendalian pembangunan di bidang kesehatan.

Pada tahun 2023 jumlah pegawai Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berjumlah 246 orang, terdiri dari 23 orang Pejabat Struktural, 45 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 170 orang Fungsional Umum. Rincian Pegawai Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2023

Golongan	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
IV/c	Pembina Utama Muda	1	1	2
IV/b	Pembina Tk. I	3	5	8
IV/a	Pembina	9	23	32
Jumlah Gol. IV		13	29	42
III/d	Penata Tk. I	23	58	81
III/c	Penata	14	32	46
III/b	Penata Muda Tk. I	15	23	38
III/a	Penata Muda	3	14	17
Jumlah Gol. III		55	127	182
II/d	Pengatur Tk. I	10	5	15
II/c	Pengatur	3	1	4
II/b	Pengatur Muda Tk. I	2	1	3
Jumlah Gol. II		15	7	22
Jumlah Gol. I		0	0	0
TOTAL		83	163	246

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 246 orang, 83 orang berjenis kelamin laki-laki dan 163 orang perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2023

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	SD	0	0	0

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
2	SMP	0	0	0
3	SMA	17	9	25
4	D1	0	1	1
5	D3	11	36	47
6	D4	2	1	3
7	S1	32	86	118
8	S2	22	30	52
9	S3	0	0	0
JUMLAH		87	159	246

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 52 orang yang dapat ditingkatkan ke jenjang Strata S-3; S1 berjumlah 118 orang yang masih dapat ditingkatkan kompetensi ke jenjang Strata-2; D4 berjumlah 3 orang; D3 berjumlah 49 orang yang masih bisa ditingkatkan jenjang pendidikan ke Strata-1; begitupun pegawai dengan tingkat pendidikan D1 berjumlah 1 orang dan SMA berjumlah 25 orang masih dapat ditingkatkan jenjang pendidikan ke jenjang Strata-1.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi serta Sumber Dana Lainnya yang Sah.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan.

2. Fungsi dan Tugas

- 2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

- 2.3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- 2.4 Pembinaan unit pelaksana teknis;
- 2.5 Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- 2.6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT disusun berdasarkan pada :

- a. Ketetapan MPR Nomor : 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- d. Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tahun 2023.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tahun 2023 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tahun 2023.

E. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, tahun 2019-2023, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan akuntabilitas keuangannya.

Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi anggaran tahun 2023 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target dan realisasi keuangannya per sasaran.

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Dalam sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasinya yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya maupun target tahun berjalan.

Terhadap capaian kinerja yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya maupun target yang ditetapkan dilakukan analisis kendala/hambatannya dan dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Sedangkan terhadap capaian kinerja indikator sasaran yang memenuhi atau lebih tinggi dari target diuraikan faktor-faktor yang mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

B. Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi Anggaran tahun 2023 beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dokumen yang dinilai untuk SAKIP yakni LKIP, Laporan Realisasi Pemakaian Keuangan dan Pendapatan, Perjanjian Kinerja, TLHP.

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya untuk diimplementasikan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk :

1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal ini yang mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan perubahan mendasar, untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan.

Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara

obyektif. Dengan Perencanaan Strategis ini diharapkan menjadi bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapasitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Menentukan orientasi masa depan.

Perencanaan strategis memungkinkan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi dan implikasi yang terjadi dan dapat diarahkan untuk merencanakan strategi organisasi pada masa mendatang.

4. Adaptif.

Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan Strategik.

5. Pelayanan Prima.

Pelayanan kepada masyarakat dalam era globalisasi merupakan hal yang utama untuk diperhatikan pemerintah. Disamping itu dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat tetap diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan perlu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai penerima jasa layanan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

6. Meningkatkan komunikasi.

Implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi. Implementasi Perencanaan Strategis oleh Pemerintah dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horisontal organisasi.

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT TAHUN 2019-2023

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah tidak diperkenankan mempunyai visi turunan dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diperkenankan misi turunan saja. Penjabaran Misi Gubernur untuk urusan kesehatan ada pada **Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**. Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH). Sasarannya yaitu Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Strategi dan arah kebijakannya antara lain :

Strategi 1 : Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat. Arah Strateginya : Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan makanan pendamping ASI bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis dan balita; Pemberian Makanan Tambahan dan suplemen serta tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri; Penanganan balita gizi buruk secara berkesinambungan; Dukungan dalam peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil lengkap dan kunjungan neonatal lengkap; Dukungan pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan; Dukungan dalam peningkatan kualitas Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M); Dukungan dalam peningkatan cakupan persalinandi fasilitas kesehatan dan persalinan oleh tenaga kesehatan; Dukungan pelaksanaan pendampingan ibu dan anak pada 1.000 HPK oleh tenaga kesehatan; Dukungan pelaksanaan pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita; Dukungan pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif; Dukungan dalam penerapan pembinaan pola makan dalam keluarga; Dukungan dalam pengembangan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); Dukungan penggerakan masyarakat hidup sehat melalui pendekatan keluarga dan lingkungan; Dukungan peningkatan jumlah desa yang melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM); Peningkatan pemahaman kesehatan di masyarakat; Penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan. Arah Kebijakannya : Rekrutmen tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PTT daerah pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan terutama bagi bidan desa; Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada tenaga kesehatan bagi dokter Spesialis dan tenaga kesehatan lainnya; Percepatan pengurusan STR tenaga kesehatan; Dukungan untuk penempatan tenaga kesehatan sesuai proporsi dan kebutuhan di FKTP dan RS di kabupaten/kota; Pemberian surat penugasan untuk pemenuhan dokter spesialis pada FKTL; Fasilitasi organisasi profesi kesehatan sebagai mitra kerja di wilayah provinsi NTT; Fasilitasi pembuatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di kabupaten/kota untuk mendapatkan formasi tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan; Fasilitasi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan uji kompetensi naik jenjang jabatan fungsional; Pelaksanaan penilaian angka kredit tenaga kesehatan; Pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat provinsi; Pengawasan dan pembinaan serta pengendalian Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA);

Strategi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Arah strateginya : Pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan terapung; Penyediaan layanan *Flying Health Care*; Peningkatan Fasilitas Kesehatan di destinasi wisata; Pemenuhan sarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar; Dukungan untuk pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas kesehatan; Pemenuhan obat dan vaksin serta pengawasan, pengendalian obat, sediaan farmasi, produk pangan, dan konsumsi; Pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat; Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan; Dukungan dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);

Strategi 4 : Mencegah dan Mengendalikan Penyakit. Arah strateginya : Dukungan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; Dukungan pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa; Dukungan dalam peningkatan kualitas dan cakupan imunisasi; Peningkatan sistem kewaspadaan dini KLB/wabah/bencana; Penanganan

KLB/wabah/bencana; Dukungan pelaksanaan Public Privat Mix untuk memperluas akses memutuskan mata rantai penularan penyakit; Dukungan pembentukan jejaring pencegahan dan pengendalian penyakit lintas batas;

Strategi 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kesehatan. Arah strateginya : Efisiensi penyelenggaraan kegiatan rutin dinas; Pelaksanaan dan penganggaran kesehatan terintegrasi; Penyediaan data kesehatan yang valid dan akurat; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dan terintegrasi; Transparansi pengelolaan keuangan; Penggunaan aplikasi pengurusan kepegawaian; Dukungan untuk optimalisasi penyerapan DAK kesehatan;

Strategi 6 : Meningkatkan Cakupan Dokumen Kependudukan Masyarakat. Arah strateginya : Percepatan pengurusan dan pemilikan KTP-EI, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan; Kerjasama pemanfaatan database kependudukan; Penyediaan tenaga teknis kependudukan dan catatan sipil yang berkualitas.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dokumen LKIP ini. Adapun Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2023 diringkas sebagai berikut :

**TABEL SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69
		Prevalensi Stunting	%	12
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Poin	A
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	%	71

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia kesehatan maupun Non-Kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kepada publik sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra Perubahan dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

A. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan kepada publik sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah Renstra Perubahan dan Penetapan Kinerja 2023, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan metode :

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dalam mengukur kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tahun 2023 perlu melihat sasaran pencapaian kinerja sesuai Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT periode 2018-2023. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yakni Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat NTT yang didalamnya memuat 64 indikator yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam pencapaian Misi ke-IV yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang masih rendah dipengaruhi oleh masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk dapat mendongkrak IPM maka **Tujuan dan IKU Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah untuk meningkatkan UHH dari 66,85 tahun 2019 pada tahun 2023 naik menjadi 68,8. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan kepada seluruh penduduk yang melingkupi peningkatan capaian standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, penurunan persentase masalah gizi balita,**

penurunan kasus kematian ibu dan bayi, peningkatan rasio tenaga kesehatan, pemenuhan jumlah unit layanan khusus kesehatan (fasilitas kesehatan DTPK), peningkatan persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, penurunan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, pencapaian reformasi birokrasi, peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan. Namun dalam menangani hal-hal tersebut masih belum mencapai target karena refocusing anggaran dan pandemic covid-19 sehingga banyak kegiatan dan pengadaan untuk mendukung program-kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Hal yang sama dalam upaya penanganan prevalensi stunting dimana target belum mencapai karena faktor ketersediaan pangan yang bergizi yang tidak terjangkau pada masyarakat; Perilaku dan budaya dalam pengolahan pangan dan pengasuhan asuh anak; ditambah dengan PHBS, air bersih sanitasi (kebersihan lingkungan) yang kurang memadai. Sasaran, indikator, target dan capaian kinerja menurut Peraturan Gubernur NTT Nomor 96 Tahun 2023 tentang IKU Perangkat Daerah, telah ditetapkan untuk Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :





**Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target dan Capaian Kinerja
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI INDIKATOR	RUMUS HITUNG INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	Umur harapan hidup dapat dimaksud pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih	rata-rata peluang ataupun waktu hidup yang tersisa pada umur tertentu	Tahun	69	67,77	98

				hidup hingga usia tertentu dan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup					
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting	Pengukuran persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu dibagi jumlah balita sasaran dikali 100%	%	12	15,2	73,33
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal	Pengukuran menggunakan LKE khusus yang akan dinilai oleh Tim SAKIP Provinsi NTT	Poin	A	BB (78,75)	98

				ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Gambaran sejauh mana instansi pemerintahan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Penilaian yang dilakukan oleh Tim TB terhadap 8 Area Perubahan yang telah ditetapkan	%	71	0	0
							RAT A-RAT A	90	SANGAT BERHASIL

KETERANGAN :

	> 85% = Sangat Berhasil
	70%-85% = Berhasil
	55%-70% = Cukup Berhasil
	<55% = Belum Berhasil

Dari indikator IKU diatas, dapat dirinci pencapaian indikator Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2		Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3		Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5		Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit		100,00%	100%	100%	Sangat Berhasil

6		Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit		100%	0%	0%	Belum Berhasil
7		Kasus Kematian Ibu (kasus)	98	0 kasus	134	0%	Belum Berhasil
8		Kasus Kematian Bayi (kasus)	822	0 kasus	973	0%	Belum Berhasil
9		Kasus Kematian Balita (kasus)	83	0 kasus	1027	0%	Belum Berhasil
10		Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	8	6	8,8	53,3	Cukup Berhasil
		· Gizi Buruk		1,50	0,90	100	Sangat Berhasil
		· Gizi Kurang		4,5	7,9	100	Sangat Berhasil
11		Prevalensi Stunting	30,8	12	15,2	73,3	Berhasil
12		Prevalensi Underweight	20,2	14,2	21,5	49	Belum Berhasil
13		Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja		100%	100%	100	Sangat Berhasil
14		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia		100%	100%	100	Sangat Berhasil
15		Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar		1	2517	100%	Sangat Berhasil
16		Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)		5 kab/kota	0	0%	Belum Berhasil
17		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		1,00%	63,00%	63	Cukup Berhasil
18		Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar		1	230	100%	Sangat Berhasil

19		Persentasi Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		68,00%	50,00%	74%	Berhasil
20		Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani		60	281	100%	Sangat Berhasil
21		Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja		1198	1483	100%	Sangat Berhasil
22		Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)		100,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
23		Persentasi Kasus HIV Yang diobati	48,7	56%	66%	100%	Sangat Berhasil
24		Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)	0	100,00%	40,90%	41%	Belum Berhasil
25		Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	13	100,00%	77,27%	77%	Berhasil
26		Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	16	22 kab/kota	15 kab/kota	68%	Cukup Berhasil
27		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
28		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
29		Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit		100	32	32	Belum Berhasil

30		Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)		100	52,17	52,17	Belum Berhasil
31		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi		1	143	100%	Sangat Berhasil
32		Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100,00%	102,64%	100%	Sangat Berhasil
33		Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
34		Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (PPT)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
35		Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)		100,00%	100,00%	100%	Sangat Berhasil
36		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar.		72,00%	44,00%	61%	Cukup Berhasil
37		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		56,00%	53,00%	95%	Sangat Berhasil
38		Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	39	90%	45,77%	51%	Belum Berhasil

39		Jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD <49/100.000 penduduk	13	22 kab/kota	18	82%	Berhasil
40		Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	4	9 kab/kota	3	33%	Belum Berhasil
41		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
42		Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22	22 kab/kota	19 kab/kota	86%	Sangat Berhasil
43		Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	4	17 kab/kota	3 kab/kota	18%	Belum Berhasil
44		Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	11	11 kab/kota	14 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
45		Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	9	22 kab/kota	20 kab/kota	91%	Sangat Berhasil
46		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	21	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
47		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	13	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil

48		Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
49		Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	100	1	100	100	Sangat Berhasil
50		Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	100	1	100	100	Sangat Berhasil
51		Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	100	1	100	100	Sangat Berhasil
52		Inovasi yang dilaksanakan	1	1	100	100	Sangat Berhasil
53		Pembangunan zona integritas	70	1	100	100	Sangat Berhasil
54		Status laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
55		Nilai SAKIP	BB	A	BB (78,75)	92,7	Sangat Berhasil
56		Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	100	1	100	100	Sangat Berhasil
57		Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	84,75	95%	83,34	87,7	Sangat Berhasil
58		Persentase realisasi pendapatan terhadap target	148,8	100%	119,82	100%	Sangat Berhasil
59		Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif		22 kab/kota	20 kab/kota	90,9	Sangat Berhasil
60		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas.		650 unit	1374	100	Sangat Berhasil
61		Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	90,71	100	94,55	94,55	Sangat Berhasil

62		Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	0,51	100%	29,93	29,93	Belum Berhasil
63		Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	72,32	100%	80,53	80,53	berhasil
64		Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	1	100%	0	0%	Belum Berhasil
					RATA-RATA	80,6	BERHASIL

KETERANGAN

	> 85% = Sangat Berhasil	41
	70%-85% = Berhasil	5
	55%-70% = Cukup Berhasil	4
	< 55% = Belum Berhasil	14

Dari tabel 3.2 di atas, capaian indikator awal periode tahun 2019 dibandingkan dengan realiasi tahun 2023. Terdapat indikator tahun 2019 yang tidak mempunyai realisasi karena pada tahun 2021 terjadi Perubahan indikator RPJMD dan RENSTRA sehingga ada indikator yang diganti indikator indikator RPJMD dan RENSTRA sehingga ada capaian indikator yang kosong. Sedangkan pewarnaan realisasi dan capaian itu hanya khusus pada tahun 2023.

Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama I
Usia Harapan Hidup (UHH)

Indicator Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Indicator UHH mencakup seluruh atau 64 indicator pada Renstra Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT 2018-2023.

Dengan rumusan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat

table kematian. Angka UHH alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tahun 2023 dengan target UHH sebesar 69 tahun, namun dapat tercapai hanya sebesar 67,77 tahun. Jika dibanding capaian tahun 2022 sebesar 67,47 tahun maka terdapat selisih kenaikan sebesar 0,30 tahun. Hal ini menjadi hal baik karena masyarakat mampu bertahan setelah pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya dibidang Kesehatan dimana dalam mendukung UHH ini Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menyiapkan berbagai program dan kegiatan serta dilaksanakan secara optimal. Terdapat 64 indikator Kesehatan pada table di atas yang mendukung program dan kegiatan yang melayani masyarakat NTT. Pada periode 2019-2023, capaian kinerja UHH tahun 2019 dengan nilai 66,85 tahun, tahun 2020 dengan nilai 67,01 tahun, tahun 2021 dengan nilai 67,15, tahun 2022 dengan nilai 67,47 tahun dan tahun 2023 dengan nilai 67,77 tahun. Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2019 capaian UHH masyarakat NTT meningkat dari 66,85 tahun 2019 meningkat menjadi 67,77 tahun pada tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, hasil kinerja 64 indikator secara keseluruhan mendapat nilai rata-rata sebesar 80,6% atau Kategori Berhasil, sedangkan secara rinci dari table di atas terlihat bahwa terdapat 41 indikator yang mendapat kategori Sangat Berhasil, 5 indikator dengan kategori Berhasil, 4 indikator dengan kategori Cukup Berhasil dan 14 indikator dengan indicator Belum Berhasil. Sedangkan untuk perbandingan realisasi 64 indicator Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT ada pada Lampiran dokumen ini.

Indikator dengan kategori Sangat Berhasil dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Indikator Dengan Kategori Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil

2		Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3		Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5		Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit		100,00%	100%	100%	Sangat Berhasil
		· Gizi Buruk		1,50	0,90	100	Sangat Berhasil
		· Gizi Kurang		4,5	7,9	100	Sangat Berhasil
6		Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja		100%	100%	100	Sangat Berhasil
7		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia		100%	100%	100	Sangat Berhasil
8		Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar		1	2517	100%	Sangat Berhasil
9		Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar		1	230	100%	Sangat Berhasil
10		Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani		60	281	100%	Sangat Berhasil
11		Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja		1198	1483	100%	Sangat Berhasil
12		Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)		100,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil

13		Persentasi Kasus HIV Yang diobati	48,7	56%	66%	100%	Sangat Berhasil
14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
16		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi		1	143	100%	Sangat Berhasil
17		Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat		100,00%	102,64%	100%	Sangat Berhasil
18		Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
19		Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (PPT)		100%	100%	100%	Sangat Berhasil
20		Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)		100,00%	100,00%	100%	Sangat Berhasil
21		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		56,00%	53,00%	95%	Sangat Berhasil
22		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
23		Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22	22 kab/kota	19 kab/kota	86%	Sangat Berhasil

24		Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	11	11 kab/kota	14 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
25		Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	9	22 kab/kota	20 kab/kota	91%	Sangat Berhasil
26		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	21	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
27		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	13	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
28		Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
29		Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	100	1	100	100	Sangat Berhasil
30		Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	100	1	100	100	Sangat Berhasil
31		Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	100	1	100	100	Sangat Berhasil
32		Inovasi yang dilaksanakan	1	1	100	100	Sangat Berhasil
33		Pembangunan zona integritas	70	1	100	100	Sangat Berhasil
34		Status laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
35		Nilai SAKIP	BB	A	BB (78,75)	92,7	Sangat Berhasil
36		Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	100	1	100	100	Sangat Berhasil
37		Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	84,75	95%	83,34	87,7	Sangat Berhasil

38		Persentase realisasi pendapatan terhadap target	148,8	100%	119,82	100%	Sangat Berhasil
39		Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif		22 kab/kota	20 kab/kota	90,9	Sangat Berhasil
40		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas.		650 unit	1374	100	Sangat Berhasil
41		Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	90,71	100	94,55	94,55	Sangat Berhasil

Dengan melihat Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa 41 indikator dari 64 indikator menunjukkan nilai Sangat memuaskan karena capaiannya >85%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT menunjukkan hasil yang memuaskan.

Terdapat 5 (lima) indikator dengan kategori Berhasil. Indikator-indikator yang masuk pada kategori Berhasil dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Indikator Dengan Kategori Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Prevalensi Stunting	30,8	12	15,2	73,3	Berhasil
2		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		68,00%	50,00%	74%	Berhasil
3		Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	13	100,00%	77,27%	77%	Berhasil
4		Jumlah kab/kota dengan insidence rate DBD <49/100.000 penduduk	13	22 kab/kota	18	82%	Berhasil
5		Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	72,32	100%	80,53	80,53	berhasil

Dari Tabel 3.4 di atas terlihat bahwa indikator yang mendapat kategori Berhasil dengan nilai antara 70%-85%. Hal ini menunjukkan bahwa 5 indikator dengan kategori Berhasil yakni Prevalensi Stunting, Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) Yang Dilakukan Pengawasan

Sesuai Standar, Kabupaten/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC >85%, Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Incidence Rate DBD <49/100.000 penduduk dan Cakupan Anak 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat 1 indikator yang meningkat yaitu Kabupaten/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC >85% dari 36% menjadi 73%. Sedangkan 2 indikator lainnya mengalami penurunan. Pada indikator pembangunan zona integritas dari 82% menjadi 75% karena adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan menjadi tidak maksimal.

Selain itu, terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori Cukup Berhasil. Indikator yang masuk pada kategori Cukup Berhasil dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Indikator Dengan Kategori Cukup Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	8	6	8,8	53,3	Cukup Berhasil
2		Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		1,00%	63,00%	63	Cukup Berhasil
3		Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	16	22 kab/kota	15 kab/kota	68%	Cukup Berhasil
4		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar.		72,00%	44,00%	61%	Cukup Berhasil

Dari Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa 4 indikator dengan kategori Cukup Berhasil dengan kategori berada di antara 55%-70%. Indikator yang masuk pada kategori Cukup Berhasil antara lain Prevalensi Wasting, Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar, Kabupaten/Kota Dengan Prevalensi Rate Kusta <1/110.000, Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Pasar Sesuai Standar. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2022, maka terlihat bahwa ketiga indikator ini menurun, karena keuangan yang tidak mencukupi.

Capaian indikator yang tersisa sebanyak 14 (empat belas) indikator mendapatkan kategori Belum Berhasil. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6 Indiator Dengan Kategori Tidak Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit		100%	0%	0%	Belum Berhasil
2		Kasus Kematian Ibu (kasus)	98	0 kasus	134	0%	Belum Berhasil
3		Kasus Kematian Bayi (kasus)	822	0 kasus	973	0%	Belum Berhasil
4		Kasus Kematian Balita (kasus)	83	0 kasus	1027	0%	Belum Berhasil
5		Prevalensi Underweight	20,2	14,2	21,5	49	Belum Berhasil
6		Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)		5 kab/kota	0	0%	Belum Berhasil
7		Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)	0	100,00%	40,90%	41%	Belum Berhasil
8		Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit		100	32	32	Belum Berhasil
9		Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)		100	52,17	52,17	Belum Berhasil
10		Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	39	90%	45,77%	51%	Belum Berhasil
11		Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	4	9 kab/kota	3	33%	Belum Berhasil
12		Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	4	17 kab/kota	3 kab/kota	18%	Belum Berhasil
13		Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	0,51	100%	29,93	29,93	Belum Berhasil

14	Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	1	100%	0	0%	Belum Berhasil
----	--	---	------	---	----	----------------

Dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa 14 indikator yang Belum Berhasil disebabkan karena berbagai faktor. Perlu diketahui bahwa indikator-indikator tersebut sebagian besar pelaksanaannya pada kabupaten/kota sehingga pencapaian kabupaten/kota berpengaruh pada pencapaian target Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terlihat bahwa terdapat indikator prioritas daerah yang secara signifikan dengan capaian nilai 0 antara lain indikator Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total target 7 unit serta indikator Jumlah kabupaten/kota sehat (KKS) yang realisasinya sebesar 0 (nol) yang sama juga hasilnya pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran. Selain itu juga, sepanjang periode Gubernur Viktor Lasikodat dan Josef Nai Soi, Kasus kematian ibu, bayi dan balita belum mencapai target yang diharapkan yaitu 0 kasus. Pada kematian ibu, penyebab terbesar antara lain Perdarahan (24,62%), Komplikasi Non Obstetric (15,6%), Hipertensi pada Kehamilan (14,17%), masalah infeksi (8,9%) dan penyebab lainnya seperti Gangguan jantung, ginjal, metabolisme, TBC dan penyakit kronis lainnya (29,8%). Pada kematian bayi, penyebab terbesar kematian antara lain Asfiksia 21.8%, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 16,3 %, Pneumonia 3.2 %, Diare dan Sepsis (6%), infeksi (8,22%) dan penyebab lainnya seperti: Cacat bawaan, gangguan syaraf, masalah jantung, dan kronis lainnya (36,5%). Pada kematian balita, penyebab terbesar kematian sama seperti kasus kematian bayi. Masih menjadi PR berat bagi pemerintah daerah untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Penyebab kematian yang masih tinggi antara lain kemampuan keuangan kabupaten/kota yang terbatas sehingga memerlukan kegiatan kolaboratif dalam hal peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pengelola Program Kesehatan Keluarga baik di tingkat Puskesmas maupun Kabupaten, Ketersediaan SDM, sarana dan fasilitas pendukung belum memadai, Perlu pendampingan dan penguatan data PWS KIA bagi kabupaten dan puskesmas. Prevalensi Underweight (berat badan kurang) adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Sumber Underweight itu bermula dan bermuara pada logistic keluarga. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan

sesuai usianya. Dari total balita yang ada di NTT yaitu 426.420 dan yang datang ke posyandu sebesar 419.798 atau 98,5 % yang masuk dalam kategori *underweight* adalah sebesar 90.224 atau 21,5% jumlah balita *underweight* tertinggi ada di Kabupaten Rote Ndao, TTS dan TTU dan yang terendah adalah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Sumba Tengah. Indikator kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria meningkat menjadi 40,90% naik 9,7% dari tahun 2022 yaitu 31% dibanding tahun 2021 yg 0% dan angka 40,90% ini merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Penyebabnya karena menunggu kesiapan dari kabupaten/kota serta menunggu penilai yang berasal dari Kementerian Kesehatan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Indikator Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit dan Persentase Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan) yang belum capai target karena terbatasnya tenaga Kesehatan dibandingkan dengan fasilitas Kesehatan. Telah dilakukan berbagai upaya baik advokasi dan koordinasi dengan Dirjen PPSDM tentang perekrutan tenaga Kesehatan Nusantara Sehat (NS), PIDI dan PGDS, Program Internship serta mengadvokasi kepala desa untuk perekrutan tenaga Kesehatan, namun kemampuan alokasi anggaran disesuaikan dengan kekuatan kas negara/daerah. Juga dengan adanya anomaly kebijakan nasional bahwa perekrutan tenaga kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dihentikan untuk diganti menjadi PPPK yang kebijakan resminya belum dimulai sehingga sebuah kewajiban jika target pemenuhan 2 indikator tersebut. Indikator Angka Penemuan Pasien Baru TBC BTA Positif (Case Detection Rate/CDR) TBC hanya mencapai 45,77%, jika dibanding tahun 2022 sebesar 35,40% atau terjadi penurunan sebesar 10,33%. Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90% dengan realisasi 3 kabupaten/kota dengan target 17 kabupaten/kota. Capaian tahun 2023 turun 3 kabupaten/kota dibanding tahun 2022. Indikator Cakupan penduduk <17 tahun yang memiliki kartu identitas anak belum mencapai target karena masih banyaknya masyarakat yang belum sadar pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dalam penggunaannya sehari-hari, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka adanya penurunan 4,07% dibanding 2022. Sedangkan indikator Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah) yang hanya mencapai 0% karena disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah yang ingin Kerjasama, namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terjadi penurunan secara drastis dari 13% menjadi 0%. Perlu lebih ditingkatkan kembali indikator-indikator ini pada waktu ke depan.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Usia Harapan Hidup” Tahun 2023 adalah sebesar 98% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** karena nilai capaian berada >85%.

**Indikator Kinerja Utama II :
Prevalensi Stunting**

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus balita stunting, wasting dan underweight. Menurut WHO ada dua penyebab langsung terjadinya gizi buruk dan gizi kurang, yaitu:

1. Kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial dan ekonomi yaitu kemiskinan.
2. Akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat makanan secara baik.

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk dan kurang adalah sebagai berikut :

1. Faktor ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Perilaku dan budaya dalam pengolahan pangan dan pengasuhan asuh anak.
3. Pengelolaan yang buruk dan perawatan kesehatan yang tidak memadai.

Pada kasus balita Stunting, gejala klinis yang bisa dijumpai pada anak adalah berupa proporsi tubuh terlihat normal tapi anak tersebut terlihat kecil dibanding anak yang seusianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, proporsi lemak dan tinggi badan tidak tepat, pertumbuhan tulang tertunda. Gejala klinis balita Wasting seperti berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan. Sedangkan gejala klinis underweight secara garis besar bisa terlihat dari berat badan anak tidak sesuai dengan umurnya.

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Utama II : Prevalensi Stunting

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting	%	12	15,2	73,33

Dari Tabel 3.7 di atas, pada tahun 2023 target penurunan Stunting sebesar 12% sedangkan realisasi sebesar 15,2% atau 73,33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 17,7% maka terjadi lompatan penurunan yang lumayan baik sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan persentasi balita stunting masih memerlukan upaya yang kuat. Tidak tercapainya target Renstra Perubahan pada akhir periode Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nai Soi memang sedikit disesali karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan PMT, selain itu juga masih terdapat kendala yakni balita mengalami gagal tumbuh disebabkan tiap bulan mengalami masalah kenaikan berat badan karena sakit, atau asupan makanan di rumah yang kurang. Tahun 2023, terdapat 2 Kabupaten yang angka Stunting meningkat yakni Kabupaten Sikka dari 13,8% atau 3.174 balita, naik menjadi 15,2% atau 3.318, sedangkan kabupaten yang mengalami kenaikan balita Stunting yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dari 24,3% atau 8.270 balita menjadi 31,9% atau 9.762 balita.

Masih memerlukan pendampingan dan perlu dibuat pedoman/standar yang mengatur tata kerja dan hubungan lembaga non pemerintah dengan Dinas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program khususnya percepatan penanggulangan *stunting*, Mengutamakan untuk mendampingi kabupaten/kota dalam kegiatan Tata Laksana Balita Gizi Buruk baik rawat jalan maupun rawat inap untuk pelayanan gizi selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai SOP.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Prevalensi Stunting”** Tahun 2023 adalah sebesar 73,33% atau dikategorikan **Berhasil** karena nilai capaian berada rentang nilai 70-85%.

Indikator Kinerja Utama III :
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Indikator penilaian AKIP Tahun 2023 antara lain : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (RENJA) dan semuanya tahun 2022. Capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Utama III : Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Poin	A (>80%)	BB (78,75%)	98

Tabel di atas merupakan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 karena hasil evaluasi kinerja SAKIP tahun 2022 belum selesai penilaian sehingga kami masih memakai hasil kinerja tahun 2021. Dari table 3.8 dapat dilihat bahwa pengukuran nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi NTT Tahun 2021 sebesar 78,75% (poin BB). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 80,05% (poin A) atau menurun sebesar 1,3%.

Penjelasan dari capaian kinerja indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat perubahan aspek penilaian SAKIP yang berbeda tahun 2020 dan 2021 sehingga hasil penilaian pun sedikit menurun dari target, dan akan diperbaiki pada tahun berikutnya.
- b. Salah satu aspek penilaian yang baru ditambahkan pada penilaian tahun 2021 yakni Serifikat Asesor AKIP pada Perangkat Daerah dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT belum memiliki sertifikat Asesor Penilai AKIP level Perangkat Daerah tersebut. Sertifikat itu dikeluarkan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTT sebagai coordinator penilai Kinerja Perangkat Daerah.
- c. Selain itu juga Masih kurangnya data dukung yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT seperti notulen rapat evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan, notulen tersebut belum valid karena belum ada tanda tangan pemimpin rapat.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Nilai SAKIP**” Tahun 2023 adalah sebesar 98% atau dikategorikan **Sangat Berhasil** karena nilai capaian berada >85%.

Indikator Kinerja Utama IV : Reformasi Birokrasi

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mindset dan culture set aparatur. Terdapat 8 area perubahan yang wajib dimiliki oleh Perangkat Daerah yakni : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pencapaian Reformasi Birokrasi yang telah dikerjakan

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Semester II TA. 2023. dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Utama IV : Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	%	71	<< 0	0

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi Semester II Tahun 2023 sebesar 0%, dibandingkan dengan capaian Semester II Tahun 2022 sebesar 90,9% dan tahun 2021 sebesar 82,2%. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur penilaian Reformasi Birokrasi Tematik, dimana focus penilaian pada indikator prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT makin baik.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Reformasi Birokrasi”** adalah sebesar **0%** atau dikategorikan **Belum Berhasil** karena nilai capaian berada **<50%**.

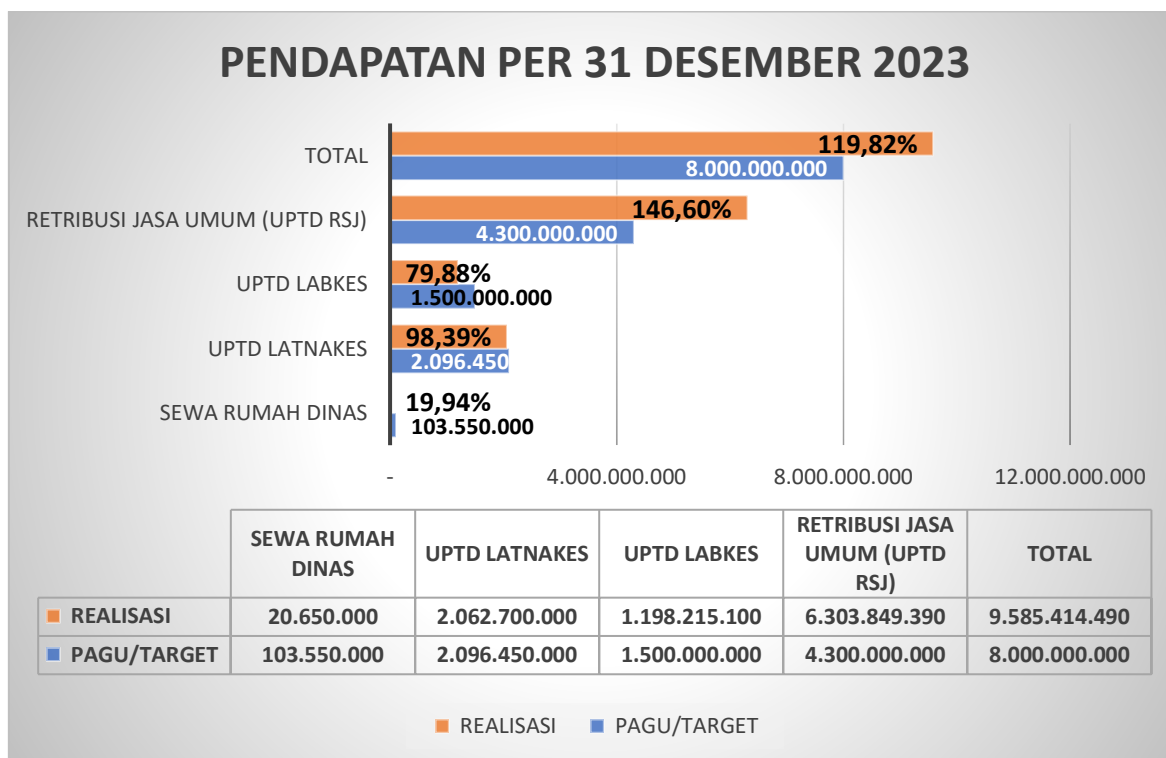
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian alokasi dan penyerapan anggaran APBD Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT mendapat target pendapatan sebesar Rp. 8.000.000.000,-. Rincian target dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah :

Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023



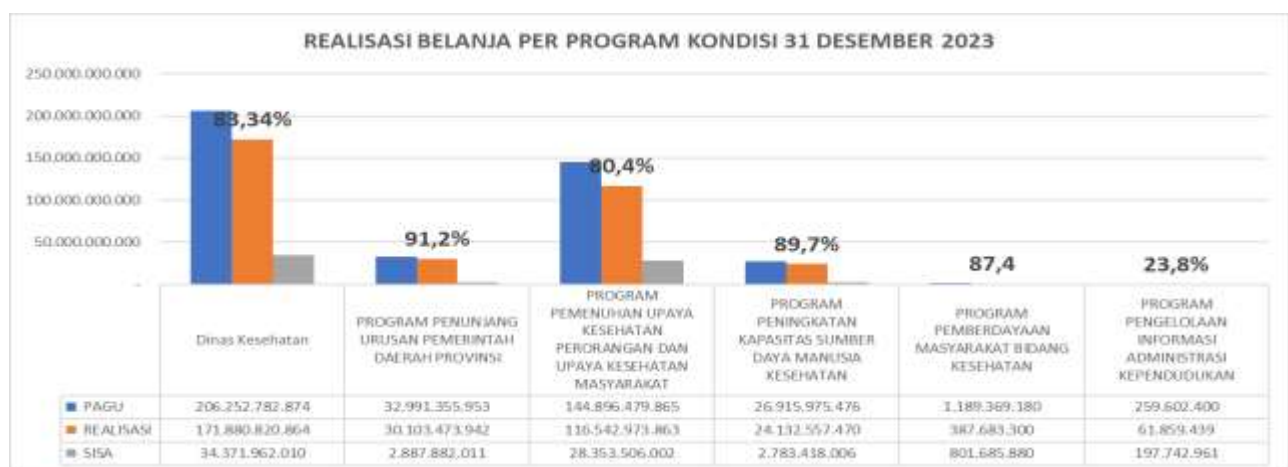
Dari Tabel 3.10 di atas terlihat bahwa pendapatan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT TA. 2023 sebesar 119,82%, melebihi target. Hal ini disebabkan dari 4 obyek pendapatan, hanya 1 yang mampu mencapai bahkan melebihi target yakni UPT RSJ Naimata dengan realisasi 146,60%. Sedangkan 3 obyek lainnya yakni Rumah Dinas dari target 103.550.000 hanya mencapai Rp. 20.650.000,- (19,94%), UPT Latnakes dari target Rp. 2.096.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.062.700.000,- (98,39%), dan UPT Labkes dari target Rp. 1.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.198.215.100,- (79,88%). Hal ini dipengaruhi oleh Rumah Dinas yang layak ditempati hanya 5 unit dengan nilai yang kecil sedangkan yang lainnya kondisi rusak berat. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT sudah bersurat kepada Badan Pendapatan Provinsi NTT untuk perbaikan Rumah Dinas yang rusak berat dan/atau penurunan target pendapatan namun tidak terealisasi. Oleh sehingga untuk meningkatkan PAD maka diperlukan adanya peremajaan Rumah Dinas yang rusak berat, atau opsi lainnya yaitu pengurangan target pendapatan.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan melebihi target (119,82%) jika dibandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan target 90%. Oleh karena itu realisasi Pendapatan mendapat Kategori **Sangat Berhasil**.

b. Pengeluaran

Sepanjang tahun 2023, target pengeluaran Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT mengalami beberapa kali refocusing dan perubahan anggaran, sehingga sampai dengan bulan Desember 2023 target dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah :

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023



Dari data tabel 3.11 di atas, dapat kita lihat bahwa :

Target belanja tahun 2023 sebesar Rp. 206.252.782.874,- yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sampai 31 Desember 2023, realisasi belanja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT hanya sebesar Rp. 171.880.820.864,- atau 83,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar 85,12%, maka terjadi penurunan sebesar 2,12%. Tidak bisa disandingkan dengan tahun 2019 karena nama Program terdapat pergantian sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2021.

Secara keseluruhan, realisasi belanja mencapai target yang ditetapkan (83,34%) dan jika dibandingkan dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan target 85% maka capaian ini masuk pada kategori Sangat Berhasil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dihitung berdasarkan metode Pengukuran Kinerja standar LKIP, dengan kategori penilaian sebagai berikut :

- a. >85% = Sangat Berhasil
- b. 70-85% = Berhasil
- c. 55-75% = Cukup Berhasil
- d. <55% = Belum Berhasil

Nilai Capaian Kinerja Indikator Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Periode 2019-2023 untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI INDIKATOR	RUMUS HITUNG INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	Umur harapan hidup dapat dimaksud pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup hingga usia tertentu dan diukur menggunakan Angka Harapan	rata-rata peluang ataupun waktu hidup yang tersisa pada umur tertentu	Tahun	69	67,77	98

				Hidup					
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting	Pengukuran persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu dibagi jumlah balita sasaran dikali 100%	%	12	15,2	73,33
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaa	Pengukuran menggunakan LKE khusus yang akan dinilai oleh Tim SAKIP Provinsi NTT	Poin	A	BB (78,75)	98

				n keuangan negara serta kesesuaian nya dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Penilaian yang dilakukan oleh Tim TB terhadap 8 Area Perubahan yang telah ditetapkan	%	71	0	0
							RAT A- RAT A	90	SANGAT BERHASIL

KETERANGAN :

	> 85% = Sangat Berhasil
	70%-85% = Berhasil
	55%-70% = Cukup Berhasil
	<55% = Belum Berhasil

Dari indikator-indikator di atas terlihat bahwa 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dengan nilai rata-rata 104%, jika dibandingkan dengan metode pengukuran LKIP maka capaian Tahun 2023 dinyatakan **Sangat Berhasil**.

B. Tindak Lanjut

Dengan melihat capaian kinerja di atas, saran yang bisa dilakukan yakni pertahankan kinerja yang sudah sesuai bahkan melewati target dan tingkatkan kinerja dengan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja yang masih belum mencapai target.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait.

Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai pengalaman dan hikmah dari kelemahan-kelemahan sistem pendekatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini maka perspektif pembangunan di era Otonomi Daerah yang luas dewasa ini cenderung berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas, kebijaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu betapapun sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijaksanaan yang akan diterapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian mengingat akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi secara terus-menerus sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk laporan yang dibuat secara periodik. Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NTT
TA. 2024 S/D 2026

NO	INDIKATOR RENSTRA RPD 2024-2026	PJ	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase Realisasi pendapatan terhadap target	SEKRETARIAT	100%	100%	100%
2	Persentase Realisasi penyerapan Anggaran APBD		100%	100%	100%
3	Presentase Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%
4	Jumlah dokumen pelaksanaan BLUD di Laboratorium Kesehatan	LABKES	1	1	1
5	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	yankes rujukan	0	0	1
6	Jumlah Fasyankes yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	yankes rujukan	0	0	55
7	Jumlah Rumah sakit yang menjalankan telemedicine	yankes rujukan	0	6	6
8	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	yankes/farmalkes	100%	100%	100%
9	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat gizi, kesehatan ibu dan kesehatan anak	yankes/farmalkes	100%	100%	100%
10	Jumlah Instalasi Farmasi Provinsi yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu dengan ruang lingkup minimal perencanaan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi.	yankes/farmalkes	1	1	1
11	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan BMHP	yankes/farmalkes	66%	69%	71%
12	Presentase terlaksananya akreditasi laboratorium kesehatan	LABKES	100%	100%	100%
13	Persentase sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang sesuai standar	LABKES	100%	100%	100%
14	Jumlah fasilitas kesehatan pada wilayah rawan bencana yang dipantau dalam kesiapan pencegahan dampak krisis kesehatan akibat bencana	yankes rujukan	34	34	34
15	Kaji cepat masalah kesehatan di lokasi bencana	yankes rujukan	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota
16	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	Yankes/primer n kestrad	100%	100%	100%
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Yankes/primer n kestrad	100%	100%	100%
18	Jumlah Puskesmas baru yang memiliki nomor registrasi.	Yankes/primer n kestrad	8	8	8
19	Jumlah PSC 119 Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Yankes/primer n kestrad	15	15	15
20	Jumlah Edukasi Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dilakukan pada wilayah rawan bencana	yankes rujukan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
21	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Yankes/primer n kestrad	100%	100%	100%
22	Persentase Puskesmas dengan nilai Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Yankes/primer n kestrad	50%	60%	70%
23	Jumlah Data dan Informasi Rujukan Pasien pada Fasilitas Kesehatan	yankes rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
24	Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel KLB	P2/surviv	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
25	Persentase KLB ditangani Kurang dari 24 jam	P2/surviv	100%	100%	100%
26	Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	P2/surviv	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
27	Presentase Jamaah Haji Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	P2/surviv	100%	100%	100%
28	Persentasi Kasus HIV Yang diobati	P2/p2pm	58%	60%	62%
29	Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC		45%	50%	55%
30	Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%		85%	85%	85%
31	Persentase Kab/Kota dengan Prevalensi Rate Kusta <1/10.000 penduduk		68%	73%	77%
32	Persentase kab/kota yang mencapai eradikasi frambusia		18%	23%	27%
33	Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria		70,0%	80,0%	90,0%
34	Jumlah Kab/Kota endemis rendah Malaria (API <1/1000 penduduk)		16 kab/kota	19 kab/kota	22 kab/kota
35	Jumlah kab/kota dengan incidence rate DBD ≤10/100.000 penduduk		5 Kab/Kota	7 Kab/Kota	9 Kab/Kota
36	Jumlah Kab endemis Rabies dengan Nol kematian karena Rabies		6 kab/kota	7 kab/kota	8 kab/kota
37	Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi kecacingan <10%		4 kab/kota	5 kab/kota	6 kab/kota
38	Persentase Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai Standar		30%	40%	50%
39	Persentase ibu hamil yang mendeteksi dini hepatitis B		55%	60%	65%
40	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengobatan diare sesuai standar		17 kab/kota	18 kab/kota	19 kab/kota
41	Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	P2/surviv	10 kab/kota	12 kab/kota	14 kab/kota
42	Jumlah Kabupaten Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM pada populasi usia > 15 tahun lebih atau sama dengan 10%	P2/PTM	5 kab/kota	8 kab/kota	11kab/kota
43	Jumlah Kabupaten Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko masalah kesehatan jiwa pada populasi usia > 15 tahun lebih atau sama dengan 10%	P2/Keswa	5 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota
44	Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker leher rahim dengan metode IVA > 10%	P2/PTM	5 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota
45	Jumlah Kabupaten/Kota > 40% FKTP yang menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	P2/PTM	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	13 Kab/Kota

NO	INDIKATOR RENSTRA RPD 2024-2026	PJ	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
46	Angka Kematian Ibu	Kesmas/KGK	152/100.000 KH	132/100.000 KH	112/100.000 KH
47	Angka Kematian Bayi		8/1000 KH	6/1000 KH	4/1000 KH
48	Angka Kematian Balita		10/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
49	Prevalensi Balita Stunting		10%	9%	8%
50	Prevalensi Balita Underweight		13,70%	13,30%	13,10%
51	Prevalensi Balita Wasting	Kesmas/Kesling	5,60%	5,40%	5,20%
52	Persentase desa stop bung air besar sembarangan		80%	90%	95%
53	Persentasi Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar		74%	76%	78%
54	Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar		60%	65%	70%
55	Persentasi TFU yang diawasi/diperiksa sesuai standar		70%	72%	74%
56	Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar		155 fasyankes	175 fasyankes	200 fasyankes
57	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat yang menyelenggarakan Kab/Kota Sehat		8 kako	11 kako	14 kako
58	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan peningkatan aktifitas fisik		9 kako	12 kako	15 kako
59	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja		12 kako	14 kako	16 kako
60	Persentase penduduk > 60 tahun tahun yang mendapatkan skreening kesehatan		70%	80%	90%
61	Persentase penduduk 15-59 tahun yang mendapatkan skreening kesehatan,		70%	80%	90%
62	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan SPM Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT	100%	100%	100%
63	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi		100%	100%	100%
64	Jumlah Rumah Sakit yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti pelayanannya sesuai standar	Yankes Rujukan	56	56	56
65	Persentasi indikator standar pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	RSJ NAIMATA	70	90	100
66	Persentasi indikator mutu yang mencapai target	RSJ NAIMATA	70	90	100
67	Persentasi peningkatan standar KPS, HPK, PPI, TKRS, MFK, PMKP, MRMIK	RSJ NAIMATA	100%	100%	100%
68	Jumlah Dokter Pelayanan medik spesialis dasar yaitu Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi dan Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Jiwa Naimata	RSJ NAIMATA	8 orang	10 orang	11 orang
69	Persentase Puskesmas dengan 9 (Sembilan) tenaga Kesehatan Standar	SDMK	32%	35%	40%
70	Persentase RS Tipe C dengan 7 Spesialis (4 Dasar dan 3 Penunjang).	SDMK	65%	75%	85%
71	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kompetensinya naik 5 %	SDMK	200	210	220
72	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pengawasan Binwas Mutu	SDMK	22	22	22
73	Jumlah tenaga kesehatan & non kesehatan RS Jiwa Naimata yang dilatih	RSJ NAIMATA	100	100	80
74	Jumlah tenaga yang mengikuti Pelatihan atau Workshop Pemeriksaan Labkesmas	LABKES	100	100	80
75	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	LATNAKES	7	7	7
76	Persentase PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	Yankes/farmalkes	100	100	100
77	Persentase Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Yankes/farmalkes	100	100	100
78	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kesmas	50%	60%	65%
79	Persentase Kab/kota yang melakukan Pembinaan Posyandu Aktif	Kesmas	100%	100%	100%
80	Persentase Kab/Kota yang minimal melaksanakan Posyandu Aktif	Kesmas	50%	65%	75%
81	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	Dukcapil	98%	99%	100%
82	Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan 15 Perangkat Daerah)		77%	78%	80%
83	Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah).		5 org	5 org	5 org
84	Cakupan Penduduk <17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak		82%	82%	83%
85	Cakupan Anak 0-18 tahun memiliki Akta		95%	95%	97%
86	Penyediaan Data Base Kependudukan untuk Pendukung SPM Kesehatan		100%	100%	100%

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR RESNTRA TAHUN ANGGARAN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)		NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2		Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)		NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3		Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi		NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB		NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5		Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit		NA	NA	NA	87,90%	87,90%	84,90%	88,54%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
6		Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit	NA	NA	NA	NA	0,00%	0,00%	100%	0%	100%	0%	0%	Belum Berhasil
7		Kasus Kematian Ibu (kasus)	0	98	0	176	175	175	0	167	0 kasus	134	0%	Belum Berhasil
8		Kasus Kematian Bayi (kasus)	0	822	0	664	930	930	0	873	0 kasus	973	0%	Belum Berhasil
9		Kasus Kematian Balita (kasus)	0	83	0	97	1047	1047	0	953	0 kasus	1027	0%	Belum Berhasil
10		Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	12	8	10,5	7,7	8	8	7,5	8,5	6	8,8	53,3	Cukup Berhasil
		· Gizi Buruk	NA	NA	NA	NA	1	1	2	1,00	1,50	0,90	100	Sangat Berhasil
		· Gizi Kurang	NA	NA	NA		7	7	5,5	7,5	4,5	7,9	100	Sangat Berhasil
11		Prevalensi Stunting	38	30,8	33,5	24,2	20,9	20,9	16	17,7	12	15,2	73,3	Berhasil
12		Prevalensi Underweight	26	20,2	23,8	18	18,3	18,3	15,4	23	14,2	21,5	49	Belum Berhasil
13		Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
14		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
15		Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar	NA	NA	NA	NA	2313	2313	1977	2274	1	2517	100%	Sangat Berhasil
16		Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)	NA	NA	NA	NA	2 kab/kota	2 kab/kota	5	0	5 kab/kota	0	0%	Belum Berhasil
17		Persentasi Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	NA	NA	NA	NA	119090	119090	1%	60,70%	1,00%	63,00%	63	Cukup Berhasil
18		Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	NA	NA	NA	NA	87	87	1	277	1	230	100%	Sangat Berhasil
19		Persentasi Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	NA	NA	NA	NA	56%	56%	64%	60,10%	68,00%	50,00%	74%	Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani	NA	NA	NA	NA	30 unit	30 unit	41	158	60	281	100%	Sangat Berhasil
21		Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja	NA	NA	NA	NA	818 unit	818 unit	1089	1042	1198	1483	100%	Sangat Berhasil
22		Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)	NA	NA	NA	NA	50%	50%	66,70%	66,70%	100,00%	0,00%	100%	Sangat Berhasil
23		Persentasi Kasus HIV Yang diobati	48	48,7	50	51	52%	52%	54%	75%	56%	66%	100%	Sangat Berhasil
24		Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)	1	0	5	2	25,00%	25,00%	100%	31,08%	100,00%	40,90%	41%	Belum Berhasil
25		Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	7	13	14	4	36,00%	36,00%	100%	72,70%	100,00%	77,27%	77%	Berhasil
26		Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	16	16	18	14	16 kab/kota	16 kab/kota	21	13	22 kab/kota	15 kab/kota	68%	Cukup Berhasil
27		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	NA	NA	NA	NA	22 kab/kota	22 kab/kota	22	22	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
28		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
29		Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit	NA	NA	NA	NA	26,07%	26,07%	100	26,07	100	32	32	Belum Berhasil
30		Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)	NA	NA	NA	NA	22,64%	22,64%	100	22,64	100	52,17	52,17	Belum Berhasil
31		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100	100	1	143	100%	Sangat Berhasil
32		Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	NA	NA	NA	NA	86,19%	86,19%	95%	97,39%	100,00%	102,64%	100%	Sangat Berhasil
33		Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
34		Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Pembinaan Terpadu (PPT)	NA	NA	NA	NA	125,00%	125,00%	100%	125%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
35		Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	NA	NA	NA	NA	25,45	25,45	100%	25,45%	100,00%	100,00%	100%	Sangat Berhasil
36		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar	NA	NA	NA	NA	38	38	64%	19,50%	72,00%	44,00%	61%	Cukup Berhasil
37		Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	NA	NA	NA	NA	40,30%	40,30%	50%	47,20%	56,00%	53,00%	95%	Sangat Berhasil
38		Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	59	39	65	12,2	9%	9%	89%	35,40%	90%	45,77%	51%	Belum Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39		Jumlah kab/kota dengan insidenc rate DBD <49/100.000 penduduk	22	13	22	9	19 kab/kota	19 kab/kota	22	12	22 kab/kota	18	82%	Berhasil
40		Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	6	4	7	7	5 kab/kota	5 kab/kota	9	4	9 kab/kota	3	33%	Belum Berhasil
41		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22	22	22	22	22 kab/kota	22 kab/kota	22	22	22 kab/kota	22 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
42		Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22	22	22	22	22 kab/kota	22 kab/kota	22	22	22 kab/kota	19 kab/kota	86%	Sangat Berhasil
43		Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	4	4	9	5	3 kab/kota	3 kab/kota	17	6	17 kab/kota	3 kab/kota	18%	Belum Berhasil
44		Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	7	11	8	9	9 kab/kota	9 kab/kota	10	14	11 kab/kota	14 kab/kota	100%	Sangat Berhasil
45		Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	10	9	13	14	20 kab/kota	20 kab/kota	19	20	22 kab/kota	20 kab/kota	91%	Sangat Berhasil
46		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	10	21	13	13	21 kab/kota	21 kab/kota	19	22	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
47		Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	16	13	18	13	19 kab/kota	19 kab/kota	20	21	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
48		Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22	22	22	22	22 kab/kota	22 kab/kota	22	22	22 kab/kota	22	100%	Sangat Berhasil
49		Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	100	100	100	100	100%	100%	100	100	1	100	100	Sangat Berhasil
50		Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	100	100	100	100	100%	100%	100	100	1	100	100	Sangat Berhasil
51		Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	100	100	100	100	100%	100%	100	100	1	100	100	Sangat Berhasil
52		Inovasi yang dilaksanakan	1	1	1	3	80%	80%	100	100	1	100	100	Sangat Berhasil
53		Pembangunan zona integritas	100	70	100	100	82%	82%	100	74,76	1	100	100	Sangat Berhasil
54		Status laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
55		Nilai SAKIP	B	BB	B	BB	A	78,75 (BB)	A	91,67 (A)	A	BB (78,75)	92,7	Sangat Berhasil
56		Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	100	100	100	83,3	100%	100%	100	100	1	100	100	Sangat Berhasil
57		Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	95	84,75	95	83,2	83,2%	83,2%	95	85,12%	95%	83,34	87,7	Sangat Berhasil
58		Persentase realisasi pendapatan terhadap target	100	148,8	100	51,7	138,20%	138,20%	100	61,38%	100%	119,82	100%	Sangat Berhasil
59		Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif	NA	NA	NA	NA	22	22	22	22	22 kab/kota	20 kab/kota	90,9	Sangat Berhasil
60		Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	NA	NA	NA	NA	685 unit	685 unit	550	685	650 unit	1374	100	Sangat Berhasil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61		Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	20	90,71	40	82,9	93,37%	93,37%	97%	99,27%	100	94,55	94,55	Sangat Berhasil
62		Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	20	0,51	40	0	23,76%	23,76%	80%	34%	100%	29,93	29,93	Belum Berhasil
63		Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	75	72,32	80	64,6	90%	90%	90%	93,06%	100%	80,53	80,53	berhasil
64		Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	2	1	4	2	5%	5%	77%	13%	100%	0	0%	Belum Berhasil
												RATA-RATA	80,6	BERHASIL

KETERANGAN :

	> 85% = Sangat Berhasil	41
	70%-85% = Berhasil	5
	55%-70% = Cukup Berhasil	4
	< 55% = Belum Berhasil	14

Tahun 2019-2020 banyak data yang kosong karena ada perubahan RPJMD-RENSTRA, sehingga sejak 2021-2023 menggunakan indikator baru

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI INDIKATOR	RUMUS HITUNG INDIKATOR	SATUAN	RPJMD AWAL						RPJMD PERUBAHAN								
							TARGET 2019	REALISASI 2019	%	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	TARGET 2021	REALISASI 2021	%	TARGET 2022	REALISASI 2022	%	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	Umur harapan hidup dapat dimaksud pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup hingga usia tertentu dan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup	rata- rata peluang ataupun waktu hidup yang tersisa pada umur tertentu	Tahun	66,37	66,85	100,7	66,67	67,01	100,5	68,1	67,15	98,6	68,8	67,47	98,1	69	67,77	98
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting	Pengukuran persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan	jumlah balita yang diukur pada waktu tertentu dibagi jumlah balita sasaran dikali 100%	%	38	30,8	118,9	33,5	24,2	127,8	21,8	20,9	104,1	16,7	17,7	94,0	12	15,2	73,33
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.	Pengukuran menggunakan LKE khusus yang akan dinilai oleh Tim SAKIP Provinsi NTT	Poin	B	A (84,3%)	84,0	B	BB (82,4%)	82,0	A	BB (80,05%)	80,0	A	BB (78,75%)	78,0	A	BB (78,75)	98
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Penilaian yang dilakukan oleh Tim TB terhadap 8 Area Perubahan yang telah ditetapkan	%	-	-	0	-	-	0	65	82,2	126,5	69	90,9	131,7	71	0	0

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI NTT

NO	INDIKATOR RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023	TARGET TAHUN 2023
1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan)	100%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan)	100%
3	Persentasi Capaian SPM Kesehatan Provinsi	100%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi KLB	100%
5	Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 unit, Akreditasi RS : 53 unit) Total 471 Unit	100%
6	Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) dengan total 7 unit	100%
7	Kasus Kematian Ibu	0 kasus
8	Kasus Kematian Bayi	0 kasus
9	Kasus Kematian Balita	0 kasus
10	Prevalensi Wasting (Gizi Buruk+Gizi Kurang) :	6
	- Gizi Buruk	1,5
	- Gizi Kurang	4,5
11	Prevalensi Stunting	12
12	Prevalensi Underweight	14,2
13	Peningkatan Layanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	100%
14	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan Lansia	100%
15	Jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar	1
16	Jumlah Kab/Kota Sehat (KKS)	5 kab/kota
17	Persentasi Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	1,00%
18	Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	1
19	Persentasi Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	68%
20	Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengukuran Kebugaran jasmani	60
21	Jumlah tempat Kerja melaksanakan kesehatan kerja	1198
22	Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana-Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target 6 unit)	100,0%
23	Persentasi Kasus HIV Yang diobati	56%
24	Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria	100,00%
25	Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%	100,00%
26	Kab/Kota dengan prevalensi rate Kusta <1/10.000	22 kab/kota
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 kab/kota
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji	100%
29	Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas Jenis Tenaga Kesehatan) Target dari 92 unit menjadi 418 unit	100%

NO	INDIKATOR RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023	TARGET TAHUN 2023
30	Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis Tenaga Kesehatan)	100%
31	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasi	100%
32	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%
33	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100%
34	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pos Upaya Kesehatan kerja (UKK)	100,00%
35	Meningkatnya upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	100,00%
36	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pasar sesuai standar.	72%
37	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	56%
38	Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate/CDR) TBC	90%
39	Jumlah kab/kota dengan insidence rate DBD <49/100.000 penduduk	22 kab/kota
40	Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0	9 kab/kota
41	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%	22 kab/kota
42	Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif /LROA > 60%	22 kab/kota
43	Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap >90%	17 kab/kota
44	Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi Kawasan Tanpa Rokok	11 kab/kota
45	Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM >50%	22 kab/kota
46	Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan dengan metode IVA dan sadanis >20%	22 kab/kota
47	Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	22 kab/kota
48	Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB >80%	22 kab/kota
49	Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam	100%
50	Persentase Standar Operasional Prosedur /SOP yang disusun dan dijalankan	100%
51	Persentase Standar Pelayanan Publik/SPP yang disusun dan dijalankan	100%
52	Inovasi yang dilaksanakan	100%
53	Pembangunan zona integritas	100%
54	Status laporan keuangan	WTP
55	Nilai SAKIP	A
56	Fasilitasi peningkatan capaian SPM kesehatan kab/kota	100%
57	Persentase penyerapan dana anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD)	95%
58	Persentase realisasi pendapatan terhadap target	100%
59	Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Posyandu aktif	22 kab/kota
60	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas.	650 unit

NO	INDIKATOR RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023	TARGET TAHUN 2023
61	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	10000%
62	Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	100%
63	Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100%
64	Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah)	100%

KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690831 199703 2 001